

PERBANDINGAN TINGKAT KELENGKAPAN *MANDATORY DISCLOSURE* DAN *VOLUNTARY DISCLOSURE* INFORMASI AKUNTANSI ANTARA INDUSTRI *HIGH-PROFILE* DAN *LOW-PROFILE*

R. Widdie Andriyanto & Mega Metalia

E-Mail: RWandriyanto@unila.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

ABSTRACT

The purpose of this research is proofing empirically whether any differences the completeness level of disclosure between high-profile industry and low-profile, along with detecting to the best of the completeness level of disclosure in various company of industry sector in Indonesian Stock exchange. Difference completeness level voluntary disclosure that significant between high profile industry and low-profile. In this research, analysis instrument that be used is Disclosure Completeness Index and mean different test Independent Sample t-Test by conviction level 95% and error level 5%. The trial result Ha1 that be done 31 various company sector industry (15 high-profile companies and 16 low-profile industry) show that Sig. (2-tailed)/2 < 0,05/2, with the result that Ha1 accepted. It means there are differences completeness level mandatory disclosure that significant between high-profile industry and low-profile. Whereas trial result Ha2 to 28 various company sector industry (13 high-profile companies and 15 low-profile industry) show that Sig. (2-tailed)/2 > 0,05/2, with the result that Ha2 rejected. This case give evidence that there are not differences between completeness level voluntary disclosure that significant between high-profile industry and low-profile.

Keywords: Disclosure, Mandatory, Voluntary, High-Profile, Low-Profile.

PENDAHULUAN

Akuntansi yang berlaku di negara-negara hukum kode, pengungkapan informasinya tidak dibiarkan dalam jumlah yang kurang tetapi pada umumnya belum berorientasi pada transparansi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman kearah globalisasi maka pemerintah berupaya agar sumber pendanaan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak lagi hanya terfokus pada kreditor saja, tetapi juga dari suntikan atau tambahan dana yang berasal dari para investor. Untuk mendapatkan dana dari investor, setiap perusahaan dituntut untuk

mengung-kapkan informasi keuangannya secara transparan dan lengkap.

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 menjelaskan beberapa tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan lainnya. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga sangat penting bagi perusahaan khususnya perusahaan yang membutuhkan dana dari investor untuk mengungkapkan informasi yang penuh dan lengkap guna menarik minat

investor dalam berinvestasi kepada perusahaan.

Informasi yang diperoleh pengguna laporan keuangan pada umumnya sangat tergantung pada sejauh mana kelengkapan informasi yang disampaikan perusahaan terhadap publik dalam laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Verdiyana, 2006).

Pada dasarnya ketentuan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) ditetapkan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Ainun Na'im dan Fuad Rakhman (2000) dalam Megawati (2002) menyatakan bahwa pada *mandatory disclosure*, ketentuan pengungkapan atas laporan keuangan ditetapkan oleh badan regulator atau lembaga yang berwenang dalam standar akuntansi yang berlaku di suatu negara, sehingga pengungkapan ini lebih bersifat wajib dan memaksa. Berbeda dengan *mandatory disclosure*, pada *voluntary disclosure* pengungkapan atas informasi perusahaan dilakukan secara sukarela tanpa

diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Melalui *voluntary disclosure*, perusahaan dapat menarik lebih banyak perhatian analis dan menurunkan keasimetrian informasi.

Choi dan Meek (1999) menyatakan bahwa dalam rangka melindungi investor, setiap pasar modal telah memberlakukan ketentuan pelaporan dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) atas laporan keuangan perusahaan. Di Indonesia, ketentuan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) ditetapkan oleh pembuat kebijakan akuntansi yaitu Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), salah satunya dalam peraturan Nomor VIII. G. 7 berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 pada tanggal 28 Mei 1996 yang telah diperbaharui ke dalam SK Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 pada tanggal 27 Desember 2002. Namun, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan perusahaan dan mendorong terciptanya *good corporate governance*, setiap perusahaan juga perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Berbagai penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Surbiyantoro (1997) melakukan penelitian terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Surbiyantoro (1997) membagi kelompok industri menjadi 2 jenis, yaitu manufaktur dan non manufaktur yang meliputi seluruh sektor yang tercakup di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelompok industri tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dalam laporan keuangan perusahaan.

Berbeda dengan Surbiyantoro (1997), penelitian yang dilakukan oleh Cooke (1992) terhadap ungkapan wajib dan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan Jepang yang *listing* di pasar modal, menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam sektor industri manufaktur merupakan jenis perusahaan yang secara signifikan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada jenis perusahaan lainnya di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok industri berhubungan dengan tingkat pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan.

Fitriyani (2001) melakukan penelitian mengenai signifikansi perbedaan pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang sistematis mengenai tingkat keluasan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Namun, terdapat perbedaan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta belum lengkap dalam melakukan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Tarigan (2008) melakukan penelitian mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan hidup dalam laporan tahunan perusahaan besar di Indonesia. Dalam penelitiannya, Tarigan (2008) membagi perusahaan ke dalam dua tipe, yaitu perusahaan *high-profile* dan *low-profile*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan yang signifikan pada industri *high-profile* dan *low-profile*. Penelitian Khodijah didukung oleh Mirfazli dan Nurdiono (2007) dalam penelitiannya terhadap pengungkapan sosial pada sektor

aneka industri di BEJ. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan sosial yang cukup signifikan antara industri *high-profile* dan *low-profile*. Penelitian Tarigan (2008), Khodijah (2006) serta Mirfazli dan Nurdiono (2007) tidak menyoroti pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), melainkan lebih difokuskan pada pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Berdasarkan evaluasi Bapepam atas laporan keuangan emiten, masih terdapat banyak kekurangan dalam *disclosure* laporan keuangan perusahaan publik (Lenny, 2004 dalam Setiati, 2006). Oleh karena itu, Bapepam perlu mengevaluasi kembali pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia dalam laporan keuangannya.

Penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas perusahaan kepada publik memang sangat menarik untuk dilakukan. Apalagi mengingat semakin diperlukannya keterbukaan informasi perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan bukan hanya harus transparan dan tepat waktu dalam penyajiannya, tetapi sebaiknya informasi tersebut dapat diungkapkan dengan lengkap guna memudahkan pengguna laporan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Pada umumnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan *high-profile* cenderung lebih luas daripada pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan *low-profile*. Salah satu hal yang menjadi alasannya adalah perusahaan *high-profile* memiliki *consumer visibility* atau sorotan dari masyarakat luas yang lebih tinggi daripada perusahaan *low-profile*, sehingga

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan pada tipe industri ini pada umumnya lebih lengkap.

Penelitian Khodijah (2006) terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan oleh industri *high-profile* dan *low-profile* di Bursa Efek Jakarta, membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan sukarela antara industri *high-profile* dan *low-profile*. Penelitian ini tidak menyoroti pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), namun lebih menyoroti pengungkapan sukarela secara spesifik, yaitu pengungkapan informasi sosial.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan (*mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*) antara industri *high-profile* dan *low-profile* yang tergabung dalam sektor aneka industri?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan antara industri *high-profile* dan *low-profile* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur yang tergabung dalam sektor aneka industri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kontribusi yang positif bagi banyak pihak, antara lain: pertama, Memberikan kontribusi teori bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengungkapan (*disclosure*). Kedua, memberikan kontribusi praktik bagi manajer perusahaan dalam mengungkapkan informasi wajib (*mandatory disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*). Terakhir membe-

rikan kontribusi kebijakan bagi para investor sehubungan dengan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Akuntansi, laporan keuangan adalah Laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan yang lazim terdiri dari *balance sheet* atau neraca, *income statement* atau perhitungan rugi laba serta *statement of changes in financial position* atau laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini ditujukan terutama bagi pembuat keputusan di luar perusahaan, guna memberi informasi tentang kondisi keuangan dari suatu perusahaan serta hasil operasi dari perusahaan tersebut.

Definisi laporan keuangan menurut Baridwan, Zaki (1997) adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Tujuan Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan dibuat untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam memperoleh informasi mengenai suatu perusahaan atau entitas. Informasi tersebut sangat penting untuk membuat keputusan ekonomi, seperti keputusan untuk membeli, menahan atau menjual investasi. Dengan demikian, laporan keuangan harus cukup informatif untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan pengguna laporan. *Accounting Principles Board (APB) Statements No. 4* menjelaskan tiga tujuan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
- 2) Tujuan umum laporan keuangan, yaitu:
 - a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis.
 - b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit.
 - c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earning* potensial perusahaan.
 - d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan, yaitu:
 - a. Relevan

Memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai untuk pembuatan keputusan.

- b. Dapat dipahami
Selain harus jelas, informasi yang dipilih juga harus dapat dipahami pemakai.
- c. Dapat diuji kebenarannya
Hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang *independent*, menggunakan metode pengukuran yang sama.
- d. Netral
Informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu.
- e. Tepat waktu
Berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.
- f. Dapat diperbandingkan
- g. Kelengkapan (Ahmed Riahi Belkaoui, 2000)

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah:

- 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.
- 2) Menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan keterbatasan laporan keuangan, dimana keterbatasan tersebut sekaligus

menjadi sifat dari laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan bersifat historis
- 2) Merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat bukan masa kini. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi apalagi untuk mera-malkan masa depan atau menentukan nilai (harga) perusahaan saat ini.
- 3) Laporan keuangan bersifat umum, bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk pihak yang akan membeli perusahaan.
- 4) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
- 5) Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material
- 6) Penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakannya jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh secara material terhadap kelayakan laporan keuangan.
- 7) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
- 8) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (*Substance Over Form*).
- 9) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- 10) Adanya pelbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam

pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarperusahaan.

- 11) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. (Sofyan Syafri, 2006)

Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*)

Secara harfiah, pengungkapan (*disclosure*) berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali, 2007). Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi yang menjadi sarana pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik yang signifikan (Verdiyana, 2006). Yang dimaksud dengan pengungkapan (*Disclosure*) menurut Kamus Besar Akuntansi adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran/pelengkap bagi laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan (suplemen). Informasi ini memberikan suatu *elaborasi* atau penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan.

Menurut Evans (2003):

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information outside the financial statements.”

Hal ini menjelaskan bahwa melalui pengungkapan, pengguna laporan keuangan akan memperoleh informasi dan gambaran yang jelas mengenai transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi perusahaan atau entitas pada suatu periode pelaporan. Pengungkapan

pan dalam laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu:

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure)

Merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh badan regulator atau lembaga yang berwenang. Di Amerika, lembaga yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah *Security Exchange Commission (SEC)*, sedangkan di Indonesia adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal

Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)

Merupakan pengungkapan informasi yang melebihi dari yang telah diwajibkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, perusahaan akan mengungkapkan informasinya secara sukarela. Pada umumnya pengungkapan sukarela merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan untuk menarik perhatian para investor sehubungan dengan keputusan investasi pada perusahaan, dimana manajer akan mengungkapkan informasi yang menurut pertimbangannya adalah *good news* dan sangat diminati oleh investor.

Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII. G. 7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan harus disajikan secara sistematis dan mengungkapkan informasi berikut ini:

- 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- 2) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

- 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Tujuan Pengungkapan

Pada dasarnya pengungkapan informasi akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Choi *et al.* (1999), praktik pengungkapan dan pelaporan keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara dengan tujuan untuk melindungi para pemakai laporan keuangan. *Securities Exchange Commission (SEC)* menyatakan tujuan pengungkapan sebagai berikut (Utomo, 2000) pertama, Protective disclosure, sebagai upaya perlindungan investor. Pada umumnya tujuan ini merupakan pertimbangan lembaga berwenang yang mengawasi pasar modal. Choi dan Meek (1999) menjelaskan beberapa tujuan pengungkapan laporan keuangan untuk perlindungan investor, yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang material kepada pengguna laporan keuangan (dalam hal ini investor).
- 2) Mengatasi kecurangan dalam penawaran publik perdagangan, pengambilan suara, dan penawaran surat berharga.
- 3) Mencari daya banding informasi keuangan dan non keuangan sehingga pengguna laporan dapat membandingkan perusahaan-perusahaan dari industri dan kawasan yang berbeda.
- 4) Menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Kedua, *Informative disclosure*, memberikan informasi yang layak bagi pengguna laporan. Tujuan ini diharapkan dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan, dimana pengguna laporan dapat menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian pengguna laporan keuangan, misalnya investor, dapat mengetahui dan memprediksi risiko investasi sebelum melakukan kegiatan investasi pada suatu perusahaan.

Konsep dan Prinsip Dasar Pengungkapan

Menurut Ghozali (2007) secara umum terdapat 3 konsep pengungkapan, yaitu: Pengungkapan yang cukup (*adequate*), Pengungkapan yang wajar (*fair*) dan Pengungkapan yang lengkap (*full*). Prinsip dasar pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan keuangan (*disclosure principle*) adalah pengungkapan penuh (*full disclosure*), mewajibkan laporan keuangan sebagai potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk satu periode yang berisi cukup informasi sehingga pemakai tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan (Harahap, 2002 seperti yang dikutip oleh Setiati, 2006).

Metode Pengungkapan atas Laporan Keuangan

Suwardjono (2005) menjelaskan bahwa informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut:

Pos statemen keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen keuangan dalam bentuk pos atau elemen keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian dan penyajian (jenis statemen, format statemen, klasifikasi pos, dan susunan pos). Jenis statemen meliputi

neraca, statemen laba-rugi, statemen perubahan ekuitas, dan statemen aliran kas.

Catatan kaki

Catatan kaki (*footnotes*) harus diberi indeks yang jelas dan teratur sehingga memudahkan pengacuan. Hendriksen dan Van Breda (1992) merinci lebih lanjut apa yang dapat diungkapkan dalam bentuk catatan kaki, yaitu perubahan metoda, hak kreditor atas aset tertentu, aset atau kewajiban bergantung (*contingent*), pembatasan atas pembayaran dividen, transaksi yang mempengaruhi modal saham dan hak pemegang ekuitas, kontrak eksekutori, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjelasan dalam kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukannya suatu unsur; penilaian alternatif, dan acuan (misalnya *schedule*) merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung.

Penggunaan istilah teknis

Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul (*captions*), atau subjudul. Nama elemen merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Penyusunan standar banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk merepresentasikan suatu realita atau makna dalam akuntansi. Di Indonesia, istilah teknis perlu diterjemahkan untuk keperluan pelaporan dalam bahasa Indonesia dan pendidikan.

Lampiran

Statemen keuangan dapat dipandang sebagai ringkasan eksekutif (*executive*

summary) dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, statemen tambahan (*supplementary state-ment*), daftar rincian (*schedul*), atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statemen utama. Jadi, penggunaan lampiran merupakan salah satu metoda pengungkapan.

Komunikasi manajemen

Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers atau *press release*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham (*letter to shareholders*), laporan dewan komisaris (*report of board of commissioners*), laporan direksi (*report of board of directors*), dan diskusi dan analisis manajemen atau DAM (*Management's Discussion and Analysis / MDA*).

Catatan dalam laporan auditor

Pengungkapan auditor yang dianggap penting dan bermanfaat adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mengha-langi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar (sering disebut pendapat wajar tanpa syarat). Pengungkapan oleh auditor pada umumnya berkaitan dengan hal-hal berikut:

- 1) Perubahan akuntansi dan konsistensi.
- 2) Keraguan tentang kelangsungan perusahaan.
- 3) Persetujuan atas penyim-pangan dari Prinsip Akun-tansi Berlaku Umum.
- 4) Penekanan suatu hal dalam statemen atau kejadian.
- 5) Pengaitan nama auditor dengan statemen keuangan tak auditan.

- 6) Statemen keuangan kompa-ratif yang salah satunya diaudit auditor lain.
- 7) Pembatasan lingkup audit dan independen auditor.

Tingkat Kelengkapan Pengungkapan

Ukuran tingkat kelengkapan pengungkapan pada umumnya dida-sarkan pada indeks kelengkapan pengungkapan. Indeks ini membagi jumlah skor *item-item* pengungkapan yang dipenuhi oleh perusahaan dengan jumlah skor *item-item* yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin banyak angka indeks pengungkapan. Jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi oleh perusahaan berhubungan positif dengan indeks keleng-kapan pengungkapan. Semakin tinggi nilai indeks kelengkapan pengung-kapan, maka semakin komprehensif praktik pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Karakteristik Sektor Aneka Industri Dalam Pengungkapan

Sektor aneka industri merupakan subsektor industri manufaktur, dimana aktivitas utamanya adalah mengha-silkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Berda-sarkan tipenya industri diklasifikasi-kan menjadi dua, yaitu:

High-Profile

Industri pada tipe ini sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ataupun dampak sosial lainnya. Hal ini menyebabkan industri *high-profile* lebih sensitif terhadap kebutuhan publik atau konsumennya, karena kegagalan atau kesalahan dalam kegiatan operasinya memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi masyarakat atau lingkungan (Zuhroh *et. al.*, 2003 dalam Tarigan, 2008).

METODE PENELITIAN

Low-Profile

Industri pada tipe ini tidak terlalu memperoleh sorotan yang luas dari publik ketika mengalami kega-galan dan atau kesalahan dalam aktivitas operasinya (Hackston dan Milne, 1996 dalam Utomo, 2000). Tipe industri *low-profile* memiliki toleransi yang lebih baik dari masyarakat ketika terjadi kesalahan dalam aktivitas operasinya daripada industri *high-profile*. Hal ini disebabkan tanggung jawab mengenai kesalahan aktivitas operasinya kepada masyarakat tidak terlalu ekstrim, sebagaimana masalah kerusakan alam yang dilakukan oleh tipe industri *high-profile* seperti industri pertambangan dan lainnya.

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Sedangkan Lenny (2004) dalam Setiati (2006) menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atas laporan keuangan emiten, masih terdapat banyak kekurangan dalam *disclosure* (pengungkapan) laporan keuangan perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta, terutama pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*). Berdasarkan uraian yang telah disajikan sebelumnya, penulis mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan mandatory disclosure yang signifikan antara industri high-profile dan low-profile pada sektor aneka industri.

Ha2: Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan voluntary disclosure yang signifikan antara industri high-profile dan low-profile pada sektor aneka industri.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terga-bung dalam sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia periode 2004 sampai 2007.

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor aneka industri. Teknik pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indrianto dan Supomo, 2002). Pertimbangan tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini:

- 1) Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2007.
- 2) Perusahaan termasuk dalam subsektor otomotif dan kompo-nennya serta subsektor tekstil dan garmen.
- 3) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit.
- 4) Data perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini tersedia.

Berdasarkan data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat 43 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar. Proses pemilihan sampel dan daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian untuk *mandatory disclosure* dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Pada *voluntary disclosure*, data yang digunakan adalah selama tahun 2005 sehingga jumlah sampel yang digunakan pada *voluntary disclosure* berbeda dengan jumlah sampel pada *mandatory disclosure*. Adapun sampel penelitian untuk *voluntary*

disclosure adalah 28 perusahaan, yaitu terdiri dari 13 perusahaan *high-profile* dan 15 perusahaan *low-profile*. Daftar perusahaan yang dijadikan sampel penelitian untuk *voluntary disclosure* dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 1.

Proses Pemilihan Sampel Penelitian *Mandatory Disclosure*

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007	43
2.	Perusahaan tidak termasuk subsektor otomotif dan komponennya serta subsektor tekstil dan garmen	(12)
3.	Data laporan keuangan perusahaan tidak lengkap	0
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	31
	Jumlah perusahaan <i>high-profile</i>	15
	Jumlah perusahaan <i>low-profile</i>	16

Tabel 2.

Nama Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian *Mandatory Disclosure*

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tipe Industri
1.	ASII	PT. Astra Internasional, Tbk	<i>High-Profile</i>
2.	AUTO	PT. Astra Otoparts, Tbk	<i>High-Profile</i>
3.	GJTL	PT. Gajah Tunggal, Tbk	<i>High-Profile</i>
4.	GDYR	PT. Goodyear, Tbk	<i>High-Profile</i>
5.	HEXA	PT. Hexindo, Tbk	<i>High-Profile</i>
6.	IMAS	PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk	<i>High-Profile</i>
7.	INDS	PT. Indospring, Tbk	<i>High-Profile</i>
8.	INTA	PT. Intraco Penta, Tbk	<i>High-Profile</i>
9.	LPIN	PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk	<i>High-Profile</i>
10.	NIPS	PT. Nipress, Tbk	<i>High-Profile</i>
11.	PASU	PT. Prima Alloy Steel, Tbk	<i>High-Profile</i>
12.	SMSM	PT. Selamat Sempurna, Tbk	<i>High-Profile</i>
13.	SUGI	PT. Sugi Samapersada, Tbk	<i>High-Profile</i>
14.	TURI	PT. Tunas Ridean, Tbk	<i>High-Profile</i>
15.	UNTR	PT. United Tractors, Tbk	<i>High-Profile</i>
16.	ARGO	PT. Argo Pantes, Tbk	<i>Low-Profile</i>
17.	MYTX	PT. Apac Citra Centertex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
18.	CNTX	PT. Centex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
19.	ERTX	PT. Eratex Djaja Limited, Tbk	<i>Low-Profile</i>
20.	ESTI	PT. Ever Shine Textile Industry, Tbk	<i>Low-Profile</i>
21.	MYRX	PT. Hanson Internasional, Tbk	<i>Low-Profile</i>
22.	INDR	PT. Indorama Syntetics, Tbk	<i>Low-Profile</i>
23.	KARW	PT. Karwell Indonesia, Tbk	<i>Low-Profile</i>
24.	PAFI	PT. Pania Filament Inti, Tbk	<i>Low-Profile</i>

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tipe Industri
25.	HDTX	PT. Panasia Indosyntec, Tbk	<i>Low-Profile</i>
26.	PBRX	PT. Pan Brothers Tex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
27.	RICY	PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk	<i>Low-Profile</i>
28.	RDTX	PT. Roda Vivatex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
29.	SSTM	PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk	<i>Low-Profile</i>
30.	TFCO	PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico), Tbk	<i>Low-Profile</i>
31.	TEJA	PT. Texmaco Jaya, Tbk	<i>Low-Profile</i>

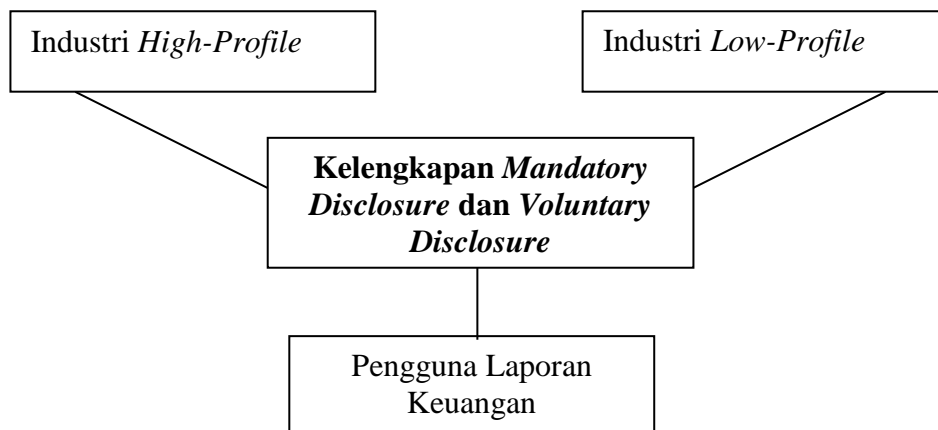
Sumber: www.bei.co.id

Tabel 3.

Nama Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian *Voluntary Disclosure*

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tipe Industri
1.	ASII	PT. Astra Internasional, Tbk	<i>High-Profile</i>
2.	AUTO	PT. Astra Otoparts, Tbk	<i>High-Profile</i>
3.	GJTL	PT. Gajah Tunggal, Tbk	<i>High-Profile</i>
4.	GDYR	PT. Goodyear, Tbk	<i>High-Profile</i>
5.	HEXA	PT. Hexindo, Tbk	<i>High-Profile</i>
6.	INDS	PT. Indospring, Tbk	<i>High-Profile</i>
7.	INTA	PT. Intraco Penta, Tbk	<i>High-Profile</i>
8.	LPIN	PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk	<i>High-Profile</i>
9.	NIPS	PT. Nipress, Tbk	<i>High-Profile</i>
10.	PASU	PT. Prima Alloy Steel, Tbk	<i>High-Profile</i>
11.	SMSM	PT. Selamat Sempurna, Tbk	<i>High-Profile</i>
12.	SUGI	PT. Sugi Samapersada, Tbk	<i>High-Profile</i>
13.	UNTR	PT. United Tractors, Tbk	<i>High-Profile</i>
14.	ARGO	PT. Argo Pantes, Tbk	<i>Low-Profile</i>
15.	MYTX	PT. Apac Citra Centertex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
16.	ERTX	PT. Eratex Djaja Limited, Tbk	<i>Low-Profile</i>
17.	ESTI	PT. Ever Shine Textile Industry, Tbk	<i>Low-Profile</i>
18.	MYRX	PT. Hanson Internasional, Tbk	<i>Low-Profile</i>
19.	INDR	PT. Indorama Syntetics, Tbk	<i>Low-Profile</i>
20.	KARW	PT. Karwell Indonesia, Tbk	<i>Low-Profile</i>
21.	PAFI	PT. Panasia Filament Inti, Tbk	<i>Low-Profile</i>
22.	HDTX	PT. Panasia Indosyntec, Tbk	<i>Low-Profile</i>
23.	PBRX	PT. Pan Brothers Tex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
24.	RICY	PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk	<i>Low-Profile</i>
25.	RDTX	PT. Roda Vivatex, Tbk	<i>Low-Profile</i>
26.	SMTM	PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk	<i>Low-Profile</i>
27.	TFCO	PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico), Tbk	<i>Low-Profile</i>
28.	TEJA	PT. Texmaco Jaya, Tbk	<i>Low-Profile</i>

Sumber: www.bei.co.id



Gambar 1. Model Penelitian

Alat Analisis

Tingkat Kelengkapan Pengungkapan

Pada penelitian ini tingkat kelengkapan pengungkapan dihitung dengan menggunakan Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP). Tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* dinyatakan dengan Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (IKP Wajib) dengan jumlah 63 butir pengungkapan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002, sedangkan tingkat kelengkapan *voluntary disclosure* dinyatakan dengan Indeks Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (IKP Sukarela) dengan jumlah 36 butir pengungkapan yang diadopsi dan dikembangkan dari penelitian Gunawan (2000) dan Sembiring (2005). Prosedur perhitungan Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP) dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Memberi skor untuk setiap *item* pengungkapan secara dikotomis, dimana jika suatu *item* diungkapkan mendapat nilai satu, dan jika tidak diungkapkan mendapat nilai nol. Dalam pemberian skor ini tidak dilakukan pembobotan pada *item-item* yang ada.

- 2) Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
- 3) Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan setiap perusahaan dengan rumus:

$$IKP = \frac{N}{K}$$

Dimana:

N = Skor total yang diperoleh

K = Skor total yang diharapkan

IKP = Indeks Kelengkapan Pengungkapan

Sumber: Fitriany, 2001

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, sebelumnya peneliti melakukan uji normalitas data dengan menggunakan *One - Sample Kolmogorov - Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah: jika *Asymp. Sig.* > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika *Asymp. Sig.* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Apabila data berdistribusi normal, maka data dapat dianalisis dengan menggunakan uji *Independent Sample t-Test* dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan

tingkat kesalahan α 5%. Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis dengan uji beda dua sisi *Independent Sample t-Test* adalah: jika $\text{Sig. (2-tailed)}/2 < 0,05/2$ maka H_0 diterima, sementara jika $\text{Sig. (2-tailed)}/2 > 0,05/2$ maka H_0 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data yang ada dianalisis untuk mengetahui jumlah *item-item* pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan, kemudian jumlah *item-item* yang diperoleh tersebut dibagi dengan jumlah pengungkapan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan sehingga diperoleh Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP). Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP) antara industri *high-profile* dan industri *low-profile*.

Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Indeks ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi wajib. Hasil perhitungan Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (IKP Wajib) dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel 4 menunjukkan bahwa Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (IKP Wajib) tertinggi pada perusahaan tipe industri *high-profile* tahun 2004 sampai 2007 adalah PT. Astra Otoparts, Tbk. sedangkan Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (IKP Wajib) terendah pada tahun 2004 sampai 2006 adalah PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk. dan tahun 2007 pada PT. Hexindo, Tbk.

Tabel 5 menunjukkan bahwa Indeks Kelengkapan Pengungkapan Wajib (IKP

Wajib) tertinggi pada perusahaan tipe industri *low-profile* tahun 2004 adalah PT. Texmaco Jaya, Tbk dan tahun 2005 adalah PT. Apac Citra Centertex, Tbk. Pada tahun 2006 IKP Wajib tertinggi adalah pada PT. Apac Citra Centertex, Tbk dan PT. Pan Brothers, Tbk, sedangkan pada tahun 2007 adalah PT. Pan Brothers, Tbk. Nilai IKP Wajib terendah di tahun 2004 sampai 2007 adalah PT.

Indeks Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Indeks ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang bersifat sukarela. Hasil perhitungan Indeks Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (IKP Sukarela) dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Indeks Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (IKP Sukarela) tertinggi pada perusahaan tipe industri *high-profile* adalah PT. Astra Internasional, Tbk sedangkan nilai terendah adalah PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk dan PT. Nipress, Tbk. Hal ini menyatakan bahwa *item* pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan oleh PT. Astra Internasional, Tbk lebih lengkap daripada perusahaan lainnya yang tergabung dalam industri *high-profile*.

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Indeks Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (IKP Suka-rela) tertinggi pada perusahaan tipe industri *low-profile* adalah PT. Apac Citra Centertex, Tbk dan PT. Roda Vivatex, Tbk sedangkan nilai IKP Sukarela terendah adalah PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk. Hal ini menyatakan bahwa *item* pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan oleh PT. Apac Citra Centertex, Tbk dan PT. Roda Vivatex, Tbk lebih lengkap daripada perusahaan lainnya yang tergabung dalam industri *low-profile*.

Tabel 4.
IKP Wajib Perusahaan Tipe Industri *High-Profile*

No.	Nama Perusahaan	2004	2005	2006	2007
1.	PT. Astra Internasional, Tbk	0,67	0,71	0,73	0,70
2.	PT. Astra Otoparts, Tbk	0,75	0,75	0,76	0,76
3.	PT. Gajah Tunggal, Tbk	0,70	0,67	0,68	0,65
4.	PT. Goodyear, Tbk	0,57	0,52	0,52	0,54
5.	PT. Hexindo, Tbk	0,52	0,57	0,52	0,48
6.	PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk	0,67	0,67	0,67	0,63
7.	PT. Indospring, Tbk	0,56	0,57	0,59	0,59
8.	PT. Intraco Penta, Tbk	0,59	0,59	0,63	0,63
9.	PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk	0,49	0,52	0,49	0,51
10.	PT. Nipress, Tbk	0,56	0,59	0,57	0,62
11.	PT. Prima Alloy Steel, Tbk	0,54	0,54	0,52	0,56
12.	PT. Selamat Sempurna, Tbk	0,56	0,59	0,57	0,60
13.	PT. Sugi Samapersada, Tbk	0,52	0,63	0,65	0,60
14.	PT. Tunas Ridean, Tbk	0,65	0,59	0,67	0,70
15.	PT. United Tractors, Tbk	0,68	0,63	0,65	0,65

Tabel 5.
IKP Wajib Perusahaan Tipe Industri *Low-Profile*

No.	Nama Perusahaan	2004	2005	2006	2007
1.	PT. Argo Pantes, Tbk	0,65	0,56	0,59	0,62
2.	PT. Apac Citra Centertex, Tbk	0,63	0,67	0,65	0,63
3.	PT. Centex, Tbk	0,49	0,49	0,48	0,46
4.	PT. Eratex Djaja Limited, Tbk	0,62	0,62	0,60	0,63
5.	PT. Ever Shine Textile Industry, Tbk	0,49	0,54	0,52	0,59
6.	PT. Hanson Internasional, Tbk	0,62	0,57	0,63	0,57
7.	PT. Indorama Syntetics, Tbk	0,60	0,60	0,62	0,63
8.	PT. Karwell Indonesia, Tbk	0,54	0,56	0,56	0,54
9.	PT. Panasia Filament Inti, Tbk	0,52	0,52	0,49	0,48
10.	PT. Panasia Indosyntec, Tbk	0,62	0,59	0,56	0,48
11.	PT. Pan Brothers Tex, Tbk	0,54	0,63	0,65	0,67
12.	PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk	0,54	0,60	0,57	0,60
13.	PT. Roda Vivatex, Tbk	0,51	0,51	0,52	0,52
14.	PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk	0,56	0,56	0,51	0,54
15.	PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation, Tbk	0,54	0,51	0,49	0,51
16.	PT. Texmaco Jaya, Tbk	0,67	0,62	0,63	0,65

Tabel 6.
IKP Sukarela Perusahaan Tipe Industri High-Profile

No.	Nama Perusahaan	2005
1.	PT. Astra Internasional, Tbk	0,61
2.	PT. Astra Otoparts, Tbk	0,42
3.	PT. Gajah Tunggal, Tbk	0,39
4.	PT. Goodyear, Tbk	0,33
5.	PT. Hexindo, Tbk	0,53
6.	PT. Indospring, Tbk	0,28
7.	PT. Intraco Penta, Tbk	0,25
8.	PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk	0,19
9.	PT. Nipress, Tbk	0,19
10.	PT. Prima Alloy Steel, Tbk	0,31
11.	PT. Selamat Sempurna, Tbk	0,28
12.	PT. Sugi Samapersada, Tbk	0,22
13.	PT. United Tractors, Tbk	0,42

Sumber: Lampiran 5

Tabel 7.
IKP Sukarela Perusahaan Tipe Industri Low-Profile

No.	Nama Perusahaan	2005
1.	PT. Argo Pantes, Tbk	0,25
2.	PT. Apac Citra Centertex, Tbk	0,39
3.	PT. Eratex Djaja Limited, Tbk	0,17
4.	PT. Ever Shine Textile Industry, Tbk	0,22
5.	PT. Hanson Internasional, Tbk	0,17
6.	PT. Indorama Syntetics, Tbk	0,28
7.	PT. Karwell Indonesia, Tbk	0,25
8.	PT. Pania Filament Inti, Tbk	0,31
9.	PT. Pania Indosyntec, Tbk	0,31
10.	PT. Pan Brothers Tex, Tbk	0,31
11.	PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk	0,36
12.	PT. Roda Vivatex, Tbk	0,39
13.	PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk	0,14
14.	PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico), Tbk	0,31
15.	PT. Texmaco Jaya, Tbk	0,25

Sumber: Lampiran 5

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai mean dan standar deviasi pada variabel penelitian, yaitu IKP Wajib dan IKP Sukarela. Statistik deskriptif dari data penelitian ini ditunjukkan pada tabel 8. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa IKP Wajib perusahaan sektor aneka industri mempunyai nilai rata-rata pengungkapan wajib 58,94% dan standar deviasi

6,880%. Hal ini menunjukkan sejauh mana kelengkapan pengungkapan informasi wajib pada perusahaan tersebut, dimana rata-rata IKP Wajibnya hanya sebesar 58,94%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mengungkapan semua informasi yang diwajibkan oleh Bapepam. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata IKP Sukarela pada sektor

aneka industri adalah sebesar 30,46% dan standar deviasi 10,786%.

Tabel 8.
Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Mean	Std. Deviation
IKP Wajib	124	0,5894	0,06880
IKP Sukarela	28	0,3046	0,10786

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada table 9 berikut ini:

Tabel 9.
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keputusan
IKP Wajib	0,313	Distribusi Normal
IKP Sukarela	0,480	Distribusi Normal

Tabel 9. di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada IKP Wajib adalah 0,313 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada IKP Sukarela adalah 0,480. Ini berarti *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada IKP Wajib dan IKP Sukarela dilakukan dengan *Independent Sample t-Test* pada tingkat keyakinan 95% dan α 5%.

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 (H_{a1}) menguji perbandingan IKP Wajib antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri. Hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Hasil Uji IKP Wajib
dengan *Independent Sample t-Test*

Tipe Perusahaan		Mean	Std. Deviation			
<i>High-Profile</i>		0,6102	0,07393			
<i>Low-Profile</i>		0,5700	0,05771			
		Levene's Test for Equality of Variances				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
IKP wajib	Equal variances assumed	4,290	0,040	3,384	122	0,001
	Equal variances not assumed			3,357	111,657	0,001

Dari tabel 10 diketahui bahwa pada *Levene's Test for Equality of Variances* nilai Sig. 0,040. Dengan demikian nilai Sig. < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa kedua varians berbeda, sehingga digunakan dasar *Equal variances not assumed* untuk mengetahui signifikansi perbedaan IKP Wajib antara industri *high-profile* dan *low-*

profile. Nilai t hitung dengan *Equal variances not assumed* adalah 3,357 dengan Sig. (2-tailed) $0,001/2 = 0,0005 < 0,025$. Dengan demikian H_{a1} diterima, artinya terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang signifikan antara industri *high-profile* dan *low-profile*.

Tabel 11.
Hasil Uji IKP Sukarela dengan *Independent Sample t-Test*

Tipe Perusahaan		Mean	Std. Deviation			
<i>High-Profile</i>		0,3400	0,12910			
<i>Low-Profile</i>		0,2740	0,07735			
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
IKP sukarela	Equal variances assumed	3,435	,075	1,667	26	,107
	Equal variances not assumed			1,610	19,048	,124

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 (Ha2) menguji perbandingan IKP Sukarela antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri. Tabel 6 menunjukkan bahwa pada *Levene's Test for Equality of Variances* nilai Sig. 0,075. Dengan demikian nilai Sig. > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa asumsi kedua varians sama terpenuhi, sehingga digunakan dasar *Equal variance assumed* untuk mengetahui signifikansi perbedaan IKP Sukarela antara industri *high-profile* dan *low-profile*. Nilai t hitung dengan *Equal variance assumed* adalah 1,667 dengan Sig. (2-tailed) 0,107, sehingga Sig. (2-tailed) $0,107/2 = 0,0535 > 0,025$. Dengan demikian Ha2 ditolak, dimana berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang signifikan antara industri *high-profile* dan industri *low-profile*.

Pembahasan

Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang signifikan antara

industri *high-profile* dan industri *low-profile*. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh pemenuhan pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan.

Selain itu, kelengkapan pengungkapan informasi wajib ini juga dapat dilihat dari nilai mean atau rata-rata IKP Wajib pada statistik deskriptif yang disajikan pada hasil pengujian hipotesis 1, dimana rata-rata IKP Wajib pada perusahaan *high-profile* adalah 61,02% sedangkan pada perusahaan *low-profile* sebesar 57%. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lenny (2004) dalam Setiati (2006) yang menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Bapepam atas laporan keuangan emiten masih terdapat banyak kekurangan dalam *disclosure* laporan keuangan perusahaan publik, terutama pengungkapan yang sifatnya wajib.

Hasil pengujian hipotesis juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri, namun perbedaan tersebut ternyata tidak signifikan. Manajer akan selalu berusaha untuk memberikan informasi mengenai perusahaan, khususnya yang bersifat *good news*.

Mereka menyadari bahwa *voluntary disclosure* dapat mengurangi keasimetrian informasi dengan pihak di luar perusahaan atau mengurangi konflik keagenan.

Rata-rata IKP Sukarela pada perusahaan *high-profile* adalah 34% dan sebesar 27% untuk perusahaan *low-profile*. Hal ini konsisten dengan penelitian Tarigan (2008) yang menunjukkan bahwa perusahaan *high-profile* cenderung lebih luas dalam mengungkapkan informasi sukarela. Meskipun penelitian ini sampai pada kesimpulan yang sama, namun penelitian Tarigan (2008) lebih menyoroti pada pengungkapan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

PENUTUP

Penelitian ini membandingkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Independent Sample t-Test* yang membandingkan Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP), baik *mandatory* maupun *voluntary*, antara perusahaan yang tergabung dalam tipe industri *high-profile* dan *low-profile*.

Hasil pengujian hipotesis pertama (Ha1) menunjukkan bahwa nilai Sig. (*2-tailed*)/2 < 0,05/2 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* yang signifikan antara industri *high-profile* dengan industri *low-profile* pada sektor aneka industri. Hasil pengujian hipotesis kedua (Ha2) menunjukkan bahwa nilai Sig.

(*2-tailed*)/2 > 0,05/2 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan *voluntary disclosure* yang signifikan antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri. Dari hasil perhitungan Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP) dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan sektor aneka industri, baik *high-profile* maupun *low-profile*, khususnya informasi yang sifatnya wajib

Implikasi pada penelitian ini adalah, Pertama, Implikasi teori dalam penelitian ini yaitu mengenai pengungkapan yang lengkap, dimana kelengkapan pengungkapan dalam laporan perusahaan sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak ekstern dan intern perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. Kedua, Implikasi praktik dalam penelitian ini yaitu bagi manajer perusahaan, dimana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktik bagi manajer perusahaan agar dapat mengungkapkan informasi wajib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) serta informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan meskipun tidak bersifat wajib.

Ketiga, Implikasi kebijakan dalam penelitian ini yaitu bagi investor sehubungan dengan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, investor dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan dan sejauh mana keterbukaan perusahaan tersebut dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan, dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Adapun saran pada penelitian ini pertama, Perusahaan dapat mengungkapkan semua informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan pengungkapan wajib yang telah ditetapkan Bapepam dalam SE-02/PM/2002. Selain itu perusahaan diharapkan untuk lebih terbuka dan transparan dalam mengungkapkan informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan, meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan oleh lembaga yang berwenang.

Kedua, Investor dapat memperhatikan keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi wajib dan sukarela dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Terakhir, Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan metode yang berbeda dan memperluas rentang waktu penelitian, terutama untuk *voluntary disclosure*. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat kelengkapan pengungkapan dengan sampel perusahaan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Proceeding Seminar Nasional. Universitas Trisakti Jakarta
- Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermedite Accounting Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Choi, F. Carol Ann Frost dan Gary K Meek. 1999. *Akuntansi Internasional Edisi Ketiga*. Prentice Hall International
- Hendriksen, Eldon dan Nugroho W. 1996. *Teori Akuntansi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Fitriany. 2001. *Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi IV
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- IAI. 2004. *Penyajian Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1*. Jakarta: Salemba
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Gunawan, Yuniati. 2000. *Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi III
- Marwata. 2001. *Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi IV

- Megawati, Yenny. 2002. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Go Publik di BEJ*. Skripsi. Universitas Lampung
- Verdiyana, Renita. 2006. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan*. google.com
- Santoso, Singgih. 2007. *Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 15*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan*
- Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo
- Setiati, Dewi. 2006. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*. Skripsi. Universitas Lampung
- Surat Keputusan Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002
- Syafri, Sofyan. 2002. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafri, Sofyan. 2006. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tarigan, Henni Kristiana. 2008. *Perbedaan Kualitas Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Hidup dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Besar di Indonesia*. Skripsi. Universitas Lampung
- Yulianti, Eka. 2007. *Analisis Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pada Laporan Keuangan Perusahaan Makanan dan Minuman di BEJ*. Skripsi. Universitas Lampung
- , 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- , www.bei.co.id
- , www.bapepam.go.id